

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM INTERVENSI MEDIK DI PUSKESMAS KOTA PADANG

Nelfrides¹, Uning Pratimaratri¹, Yofiza Media¹

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email: nelfrides@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 37 huruf f Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan “Perawat dalam melakukan Praktik Keperawatan berkewajiban melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensi Perawat”. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis/ dokter kepada Perawat. Di Puskesmas Kota Padang Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang belum dilakukan secara tertulis oleh tenaga medis/ dokter kepada perawat. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam intervensi medik di Puskesmas Kota Padang? 2) Apa sajakah bentuk-bentuk intervensi medik yang dilakukan oleh Perawat di Puskesmas Kota Padang? Penelitian ini adalah yuridis sosiologis, jenis data berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap perawat di Puskesmas Kota Padang perawat bekerja dilengkapi standar prosedur operasional, perawat memiliki Surat Tanda Registrasi, memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP). 2) Bentuk-bentuk intervensi medik yang dilakukan perawat di Puskesmas Kota Padang adalah pelimpahan wewenang secara delegatif dan mandat.

Kata Kunci: Perawat, delegatif, mandat, Puskesmas.

LEGAL PROTECTION OF NURSES IN MEDICAL INTERVENTION AT PUSKESMAS KOTA PADANG

Nelfrides¹, Uning Pratimaratri¹, Yofiza Media¹

¹Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: nelnelfrides@gmail.com

ABSTRACT

Article 37 letter f of Law Number 38 Year 2014 concerning Nursing "Nurses in carrying out nursing practice are obliged to carry out actions of delegation of authority from other health workers in accordance with the competence of nurses". The implementation of tasks based on the delegation of authority can be given in writing by medical personnel / doctors to nurses. In Padang City Puskesmas, the implementation of tasks based on the delegation of authority has not been carried out in writing by medical personnel / doctors to nurses. Formulation of the problem: 1) What is the form of legal protection for nurses in medical intervention at Puskesmas Kota Padang? 2) What are the forms of medical interventions performed by nurses at Puskesmas Kota Padang? This research was a socio-legal approach, the types of data were primary data and secondary data. Data obtained through document study and interviews. The data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: 1) Forms of legal protection for nurses at the Puskesmas Padang City working nurses are equipped with standard operational procedures, nurses have registration certificates, have a license to practice nurses (SIPP). 2) The forms of medical intervention carried out by nurses at the Puskesmas in Padang City are delegation of authority and mandate.

Keywords: Nurse, delegative, mandate, Puskesmas.